

Tinjauan hukum kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20324709&lokasi=lokal>

Abstrak

Banyaknya jumlah bank di Indonesia menyebabkan struktur perbankan tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 8/16/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Kebijakan ini mengatur bahwa dalam perbankan Indonesia, satu pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada satu bank saja. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini membahas tentang prosedur pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal oleh Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari satu bank di Indonesia serta akibat hukumnya terhadap perbankan. Kebijakan kepemilikan tunggal dilakukan dengan memilih salah satu dari tiga opsi yang ada pada PBI tersebut, yaitu mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya; melakukan merger atas bank-bank yang dikendalikannya; atau membentuk sebuah Bank Holding Company. Adapun akibat hukum pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal terhadap bank di Indonesia adalah terjadinya pengalihan pemegang saham, aktiva serta pasiva bank-bank yang menggabungkan diri kepada bank hasil merger pada opsi merger; menyebabkan perubahan pengendalian terhadap bank, namun tidak mengubah identitas awal dari bank-bank tersebut pada opsi pengalihan saham; serta terjadinya pengalihan kepemilikan saham dari bankbank yang dinaungi terhadap Bank Holding Company pada opsi pembentukan Bank Holding Company. Sedangkan akibat hukum pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal terhadap keadaan perbankan Indonesia secara umum adalah dapat terciptanya struktur perbankan yang sehat, kuat dan efisien sebagai hasil dari konsolidasi perbankan dan efisiensi fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia.